PERAN ANALISIS DATA DALAM PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS

Rina Juliati, S.Si, M.Si
Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Bappeda Provinsi Kaltim

Balikpapan, 4 Oktober 2022



- DASAR HUKUM
- PERMASALAHAN KETERSEDIAAN DATA YANG BERKUALITAS
- PERAN DATA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DASAR HUKUM DIPERLUKANNYA DATA & INFORMASI PEMBANGUNAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Pasal 31

"Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan"

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Pasal 274

"Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah"

<u>Pasal 391</u>

"Pemerintah Daerah Wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah (informasi pembangunan dan keuangan daerah) yang dikelola dalam suatu sistem informasi"

3. Perpres Nomor 39 Tahun 2019

Pasal 2

Pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

4. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pasal 144

Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

5. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah Wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Informasi Pembangunan Daerah & Informasi Keuangan Daerah; (2) Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam SIPD.

PERMASALAHAN PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS

PERPRES 39 TAHUN 2019

Sistem Database Sektoral yang belum terpadu

Belum adanya regulasi pendukung pengelolaan data di tiap daerah

Belum seragamnya referensi atau data induk

kode

Teknologi

TATA
Regulasi

KELOLA
DATA

Standar

Da

DATA

Kode Induk

Metadata

Interoperabilitas

Unit kelembagaan pengelola data yang belum siap

Keterbatasan SDM Pengelola Data

Data yang ada belum berkualitas :

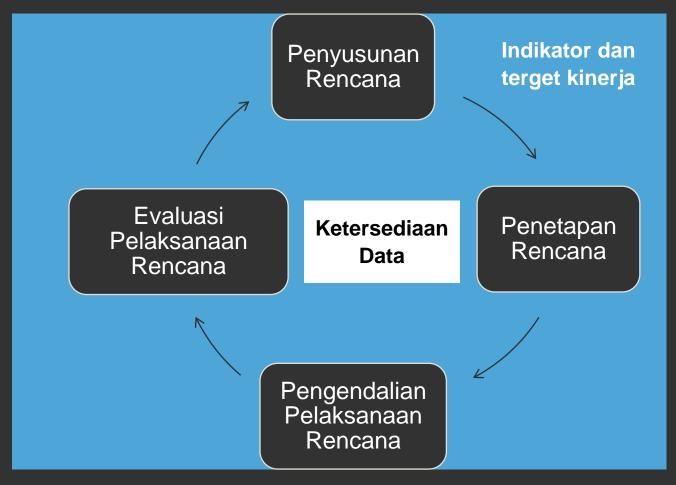
- Belum memenuhi Standar Data
- Belum memiliki Metadata

Data yang tersedia sulit diakses dan belum terintegrasi satu sama lain, sehingga kurang dapat dimanfaatkan dengan baik

PERAN DATA DALAM SIKLUS PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

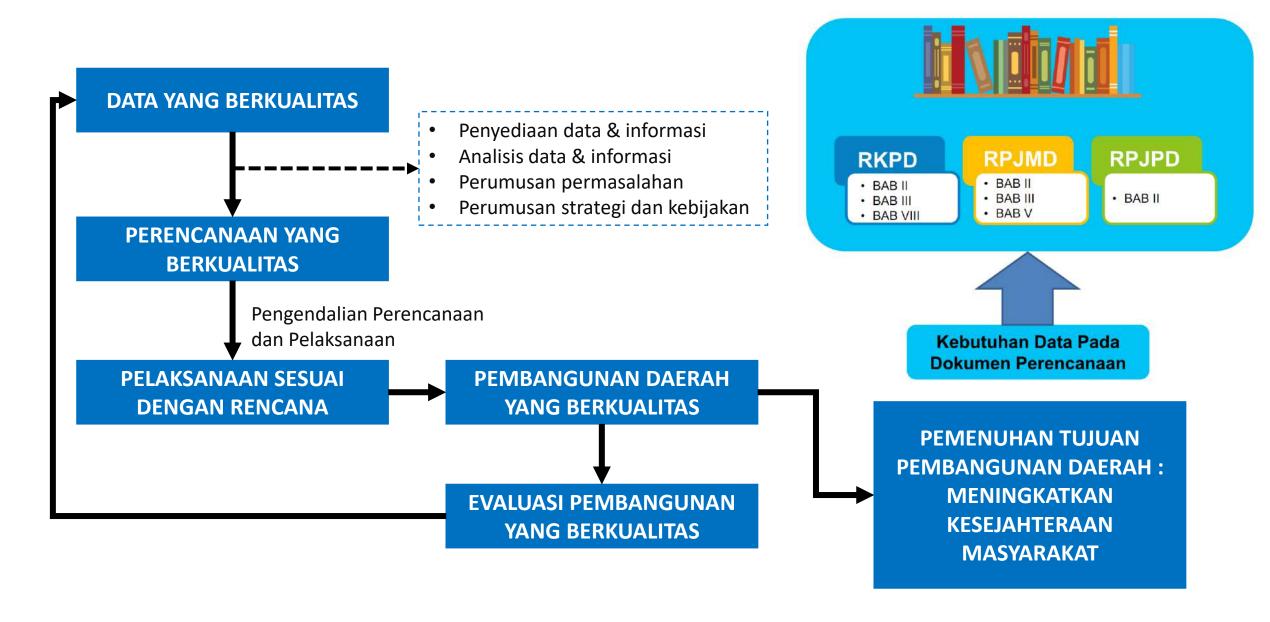


<u>This Photo</u> by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC



PEMBANGUNAN DIMULAI DENGAN KETERSEDIAAN DATA, DAN DIAKHIRI DENGAN MENGHASILKAN DATA

PERAN DATA YANG BERKUALITAS DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH









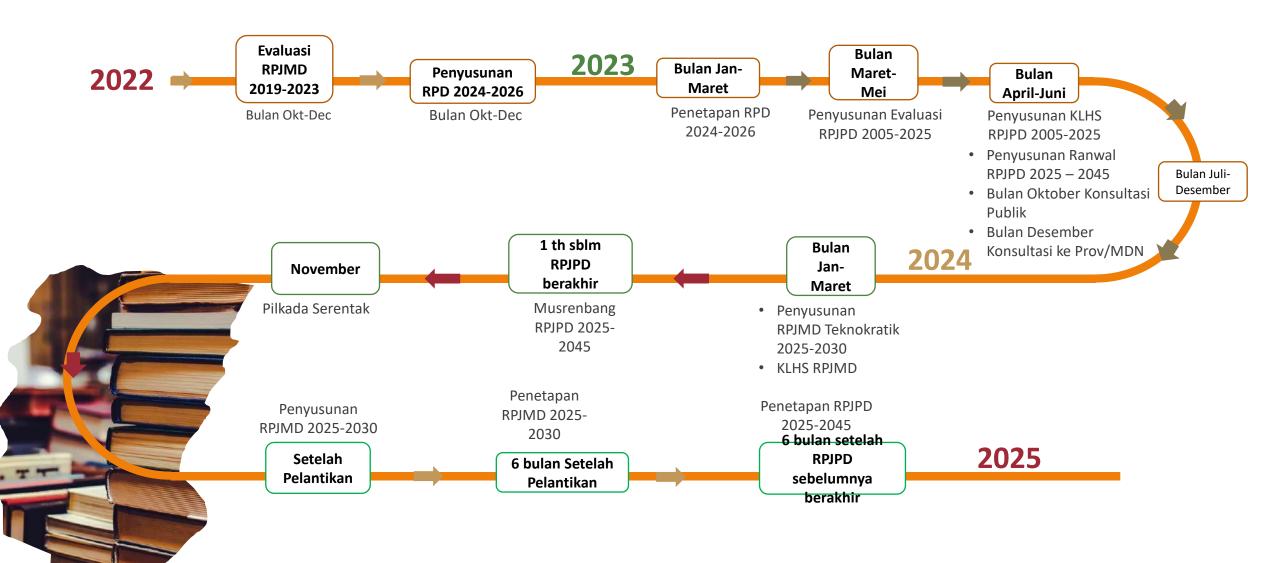




- a. Penyiapan Data;
- b. Pengolahan Data;
- evaluasi pembangunan.
- a. Penyusunan analisis dan evaluasi pembangunan
- c. Penyusunan analisis danb. Penyampaian hasil analisis dan evaluasi pembangunan;
 - c. Penyusunan draft Rancangan Awal RKPD.

- a. Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD;
- b. Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD.

AGENDA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH BAGI DAERAH YANG KDH BERAKHIR TAHUN 2023





02

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- PROFIL UMUM & VISI-MISI KEPALA DAERAH
- CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN TAHUN 2021
- PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROFIL UMUM WILAYAH KALIMANTAN TIMUR







Jumlah penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2021 sebesar 3.803.972 jiwa & terus meningkat menjadi 3.891.849 jiwa pada Semester I tahun 2022.

Memiliki luas wilayah 16,7 juta ha yang terdiri dari luas laut 4 juta ha dan luas daratan 12,7 juta ha (65%-nya merupakan kawasan hutan)



Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yakni menjadi 6,31 persen





Tahun 2021 karena dampak Pandemi COVID-19, maka terjadi penurunan nilai PDRB migas hingga menjadi sebesar Rp 695,16 T, Semester I tahun 2022 nilai PDRB Migas mencapai Rp 417,07 T

Laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur meningkat dari tahun sebelumnya, hingga mencapai 2,15 persen pada tahun 2021, sampai dengan Agustus 2022 Laju Inflasi mencapai 3,87 persen





BERANI UNTUK KALTIM BERDAULAT

MISI 1

Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas

MISI 2

Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan

MISI 3

Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan

MISI 4

Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

MISI 5

Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik

KONDISI KESEJAHTERAAN KALTIM

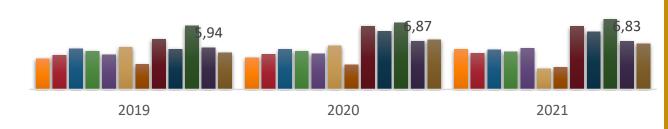
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Pada tahun 2021, IPM Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan sebesar 0,64 poin, menjadi 76,88. Kota Samarinda adalah IPM tertinggi di Kalimantan Timur sebesar 80,76



TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Pada tahun 2021, TPT Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan sebesar 0,04 poin, menjadi 6,83%. Kota Samarinda adalah IPM tertinggi di Kalimantan Timur sebesar 80,76



TINGKAT KEMISKINAN

Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 sebesar 6,54% meningkat 0,44 poin terhadap 2020



INDEKS GINI

Indeks Gini mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2020 dari 0,328 menjadi 0,334, namun masih berada di bawah nasional



CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN TAHUN 2021

No	Indikator	Target 2021	Capaian 2021
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,75	76,88
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,05	6,54
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,81	6,83
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1	2,48
5.	PDRB per Kapita (Juta Rp)	167,5	182,54
6.	LPE Non Migas dan Batubara (%)	1,5	2,69
7.	Nilai Tukar Petani	112	120,94
8.	Indeks Gini	0,313	0,334
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75,95	75,06
10.	Indeks Reformasi Birokrasi	B (71,00)	B (68,47)

- 1. Relatif tingginya tingkat kemiskinan
- 2. Relatif tingginya tingkat pengangguran terbuka
- 3. Masih adanya ketimpangan pendapatan
- 4. Potensi penurunan kualitas lingkungan hidup



IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023

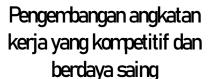
TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KALTIM 2023

TEMA RKPD 2023

"PENINGKATAN PRODUKTIVITAS GUNA MEWUJUDKAN KETAHANAN SOSIAL DAN EKONOMI DAERAH YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN DALAM KERANGKA KALIMANTAN TIMUR YANG BERDAULAT"

PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD 2023







Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal



Peningkatan produktivitas komoditas unggulan sektor pertanian dalamarti luas



Peningkatan produktivitas industri pengolahan secara berkelanjutan



Pemerataan dan pemantapan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur wilayah



Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2023
Misi 1 : Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber	Tujuan 1: Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,88	77,75
Daya Manusia Yang	Sasaran I: Meningkatnya nemerataan taraf pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,81	14,13
Berakhlak Mulia Terutama Perempuan,		Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,84	10,17
Pemuda Dan Penyandang Disabilitas	Sasaran 2 : Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Presentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan (%)	0,13	0,40
	Sasaran 3 : Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,61	74,75
	Sasaran 4 : Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	65,54*	65,70
	Tujuan 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	6,54	5,90
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,83	6,50
	Sasaran 5 : Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7071	0,6900
	Sasaran 6: Meningkatnya daya saing angkatan kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	26,04	40,00

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2023
Misi 2:		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,48	3,5 <u>+</u> 1
Berdaulat Dalam	Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	PDRB per Kapita (Juta Rp)	182,54	193
Pemberdayaan Ekonomi Wilayah Dan		LPE Non Migas dan Batubara (%)	2,69	2,50
Ekonomi Kerakyatan		Nilai Tukar Petani	120,94	120,00
Yang Berkeadilan	Sasaran 7 : Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah	Pendapatan Daerah (Miliar Rp)	10.090	12.122
	Sasaran 8 : Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$)	4,75	1,89
	Sasaran 9 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Batubara	Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan Batubara thd PDRB (%)	7,97	9,86
	Sasaran 10 : Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0,54	0,65
		Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,32	0,37
		Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	4,97	5,30
		Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,56	1,72
		Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1,06	1,08

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2023
	Sasaran 11: Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara	Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara (Triliun Rp)	41,15	35,67
	Sasaran 12 : Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	15,13	13,50
	Sasaran 13 : Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	10,47	9,91
		Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB (%)	16,34	15,68
Misi 3 : Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan	Tujuan 4: Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Gini	0,334	0,308
Infrastruktur		Jumlah Penumpang yang terlayani (orang)	4.664.922	8.100.000
Kewilayahan		Jumlah barang yang diangkut (ton)	323.231.994	370.000.000
		Jumlah kawasan ekonomi yang terhubungkan (Kawasan)	4	7
		Capaian akses air minum layak (%)	70,78	70,53
		Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	14.078,50	14.778,50
		Luas kawasan kumuh (Ha)	1.190,14	1.137,82
		Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	406,3	329
		Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	75,38	83,10
		Rasio elektrifikasi (%)	91,98	05.00

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2023
Misi 4 : Berdaulat Dalam	Tujuan 5: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,06	76,15
Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan	Sasaran 15 : Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	41,96	29,33
	Sasaran 16 : Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Risiko Bencana	154,02	150,49
Misi 5 : Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang	Tujuan 6: Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	B (68,47)	B (72,00)
Bersih, Profesional Dan Berorientasi	Profesional Sasaran 17: Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,57	83,00
Pelayanan Publik		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik (SPBE)	2,22	3,30
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai)	77,67	78,0
	Sasaran 19 : Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda (Level)	Level 3	Level 4



PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023

APAKAH RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TELAH DIDASARKAN PADA HASIL
ANALISA DATA DAN INFORMASI YANG TEPAT
SEBAGAI DASAR DALAM MERUMUSKAN
RENCANA BELANJA ????

APAKAH BELANJA SKPD SUDAH EFEKTIF DALAM UPAYA PENUNTASAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN GUNA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN ????



03

PELAKSANAAN SATU DATA DI PROV. KALTIM

- PENYELENGGARAAN FORUM SATU DATA KALTIM
- IDENTIFIKASI DAFTAR DATA
- PENGEMBANGAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH





PENYELENGGARAAN SATU DATA KALTIM





Forum Satu Data Indonesia (Koord. Forum, Sekretariat SDI, Pembina Data, Walidata, Produsen Data)

- Penentuan daftar Data
- penetapan daftar Data
- penentuan rencana aksi Satu Data



PENGUMPULAN DATA

PEMBINA DATA

Menentukan landasan pengumpulan data (standar data, metadata)

Produsen Data:

melakukan pengumpulan Data sesuai dengan Standar Data; daftar data, metadata, jadwal pemutakhiran Data dan rilis Data.

Walidata:

Pengumpulan data dari produsen data.



PEMERIKSAAN DATA

WALIDATA:

Melakukan pemeriksaan terhadap data yang telah dikumpulkan

PRODUSEN DATA:

Melakukan perbaikan apabila ada data yang tidak memenuhi prinsip Satu Data Indonesia

PEMBINA DATA

Melakukan pemeriksaan ulang untuk data prioritas



WALIDATA:

DATA

Mempublikasikan data yang telah diperiksa dan memenuhi prinsip SDI.

PENYELENGGARA SATU DATA KALIMANTAN TIMUR

Pergub 48 Tahun 2021



WALIDATA

WALIDATA PENDUKUNG

PRODUSEN DATA

Statistik : BPS Spasial : Bappeda

- Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data
- Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kalimantan Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Diskominfo

- Memeriksa kesesuaian data
- Memeriksa kelengkapan data
- Menyebarluaskan data dan metadata di Portal Satu Data
- Membantu Pembina data dalam membina Produsen Data
- Memberikan dukungan dan pendampingan kepada walidata tingkat Kab/Kota

Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal

- Membantu walidata memeriksa kesesuaian data
- Menyebarluaskan data setelah mendapat persetujuan dari walidata

Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal

- Memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data
- Menghasilkan Data
- Menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata

SEKRETARIAT SATU DATA KALTIM



Forum Satu Data Kalimantan Timur dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Provinsi Kalimantan Timur



Tugas Sekretariat Satu Data Kalimantan Timur :

- memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kalimantan Timur; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Kalimantan Timur.



Koordinator Sekretariat Satu
Data Kalimantan Timur **Bappeda Provinsi Kalimantan Timur**

FORUM SATU DATA KALIMANTAN TIMUR

Forum Satu Data Kalimantan Timur berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Kalimantan Timur mengenai :

- a. **Daftar data** yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
- b. **Pemenuhan prinsip Satu Data Indonesia** dalam penyelenggaraan perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, penyimpanan dan penyebarluasan data;
- c. Pelaksanaan Rencana aksi Satu Data Indonesia;
- d. **Penerapan unsur-unsur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik** secara terpadu dalam penyelenggaraan Satu Data Kalimantan Timur;
- e. **Kerjasama** penyelenggaraan Satu Data Kalimantan Timur dengan pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah; dan
- f. **Penyelesaian permasalahan** terkait penyelenggaraan Satu Data Kalimantan Timur.
- g. Forum Satu Data Kalimantan Timur melaksanakan pertemuan koordinasi **minimal 2 (dua) kali dalam setahun** dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- h. Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, **Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur meminta arahan Gubernur.**
- i. **Pembentukan Forum Satu Data Kalimantan Timu**r ditetapkan oleh Keputusan Gubernur setiap Tahun Anggaran

KOORDINATOR FORUM SATU DATA

KEPALA BAPPEDA



Forum Satu Data Kalimantan Timur terdiri atas :

- Pembina Data;
- Walidata;
- Walidata Pendukung;
- Walidata Kabupaten/Kota
- Produsen Data;
- Pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.

IDENTIFIKASI DAFTAR DATA

3 BIDANG BIDANG BIDANG PEREKONOMIAN **INFRASTRUKTUR** PEMERINTAH DAN PENGEMBANGAN DAN SDA KEWILAYAHAN 418 Daftar Data 2.016 Daftar Data MANUSIA 1.956 Daftar Data TOTAL 4.390 DAFTAR DATA STATISTIK **219** DAFTAR DATA **GEOSPASIAL**

PERKEMBANGAN SATU DATA KALIMANTAN TIMUR

Portal Satu Data Kaltim telah dibangun oleh Diskominfo Kaltim data.kaltimprov.go.id

> Portal Satu Data Kaltim

Regulasi

Pergub Satu Data Kaltim No. 48 Tahun 2021 Rapat Koordinasi Integrasi JIGD Kaltim

Koordinasi

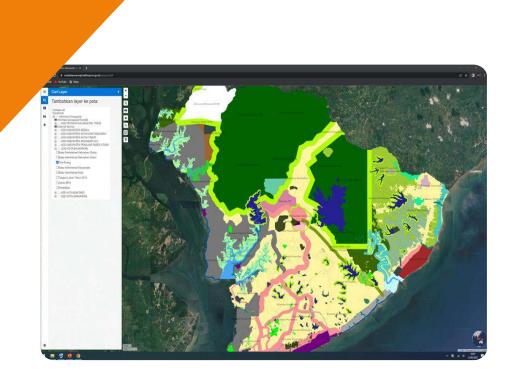
Bimtek

Bimtek Metadata dan KUGI Geospasial

FORUM SATU DATA KALIMANTAN TIMUR

Bimtek Metadata Statistik Sektoral

INTEGRASI DENGAN SIMPUL-SIMPUL JARINGAN KABUPATEN/KOTA



SUDAH TERINTEGRASI

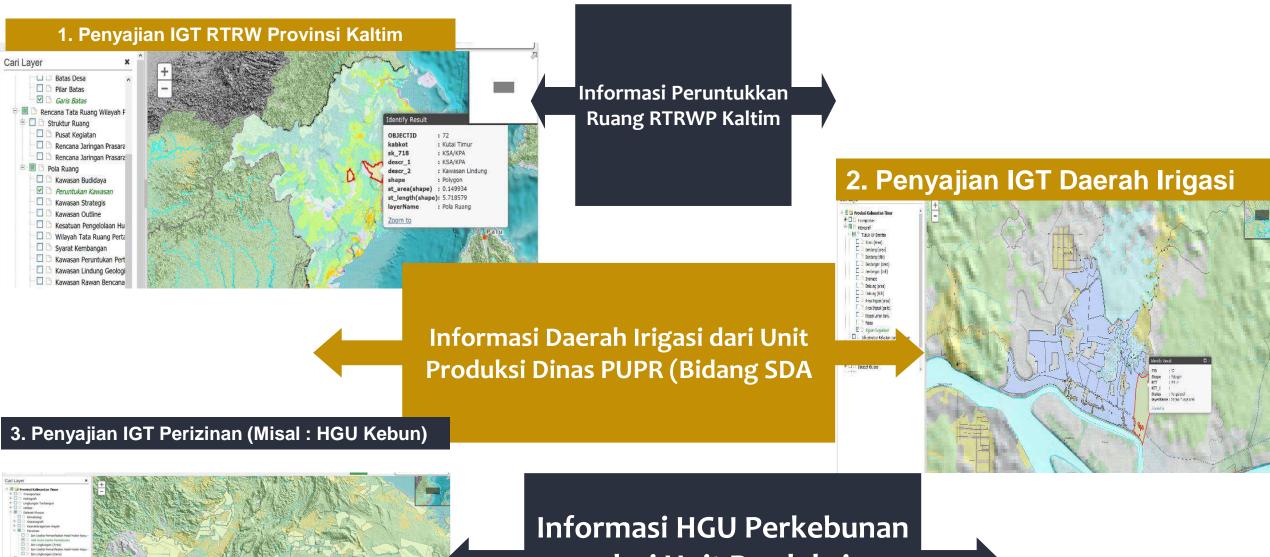
- . Kota Samarinda
- 2. Kota Balikpapan
- 3. Kota Bontang
- 4. Kabupaten Berau
- 5. Kabupaten Penajam Paser Utara
- 6. Kabupaten Kutai Timur
- 7. Kabupaten Kutai Barat
- 8. Kabupaten Mahakam Ulu

RENCANA INTEGRASI TAHUN 2022

- 1. Kabupaten Paser
- 2. Kabupaten Kutai Barat

Mendorong Kab. Paser dan Kab. Kubar untuk segera memiliki geoportal dengan menggunakan geoportal PALAPA dibantu oleh Badan Informasi Geospasial

CONTOH PEMANFAATAN IGT MELALUI GEOPORTAL ONE DATA ONE MAP



Informasi HGU Perkebunan dari Unit Produksi BPN Kanwil Kaltim CONTOH ANALISIS UNTUK DAERAH IRIGASI (1)

Bagaimana Tindaklanjutnya? Siapa yang bertanggungjawab?

Kawasan Peruntukan Pertanian yang Masuk Dalam Daerah Irigasi Semurut dan Buyung-Buyung

Irigasi Fungsional

Tanaman Pangan dan Holtikultura

Kawasan Peruntukan Pertanian di Kabupaten Kutai Barat Yang Belum Masuk Dalam Delineasi Daerah Irigasi

CONTOH ANALISIS UNTUK DAERAH IRIGASI (2)

Overlay Antara Daerah Irigas dengan Lahan Eksisting Pertanian



Kondisi Eksisting Pertanian Yang Masuk Dalam Delineasi Daerah Irigasi (DI Semurut dan Buyung-Buyung

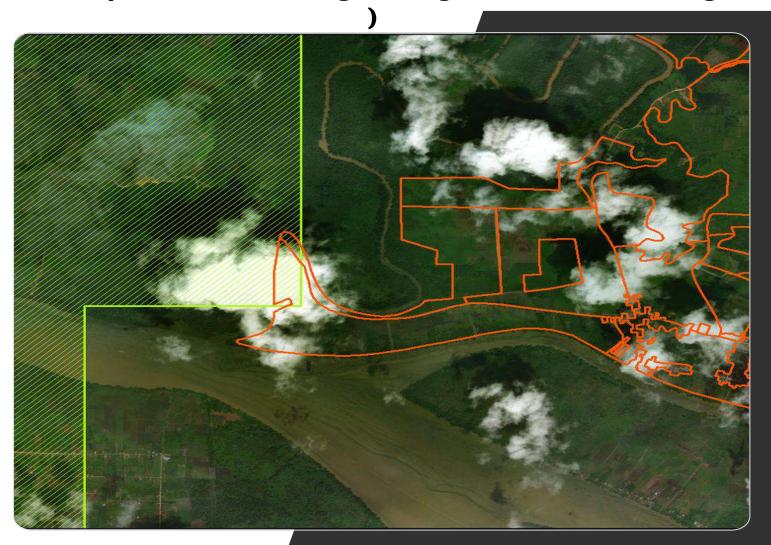
Jarak Bendung Semurut dengan DI Semurut adalah 1 kilometer



Kondisi Eksisting Pertanian di Desa Sidorejo, Kabupaten Penajam Paser Utara Yang Belum Masuk Dalam Delineasi Daerah Irigasi

CONTOH ANALISIS UNTUK DAERAH IRIGASI (3)

Overlay Antara Daerah Irigasi dengan Perizinan Eksisting



Deliniasi Izin PKP2B yang BERAU COAL masuk dalam D.I. MERANCANG



SISTEM ANALISIS DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN (SADAP) KALTIM

TUJUAN

TUJUAN JANGKA PENDEK

- Bappeda dan SKPD dapat melakukan pengolahan data Informasi Geospasial analisis Spasial dan analisis Statistik untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan daera
- Bappeda dan SKPD memperoleh informasi hasil analisis Spasial dan analisis Statistik untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan
 Pembangunan Daerah berdasarkan hasil analisis data spasial dan statistik

TUJUAN JANGKA PANJANG

- Penyusunan Dokumen Perencanaan
 Pembangunan Daerah disusun berdasarkan dari analisis Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
- Integrasi Hasil Analisis Data Perencanaan Provinsi dan Kab/Kota

MANFAAT

MANFAAT INTERNAL

- dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun berkualitas, terukur, dan terarah melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, Spasial (THIS).
- Penetapan target indikator Tujuan dan Sasaran dapat dirumuskan secara tepat (tidak underexpectation atau over-expectation).

MANFAAT EKSTERNAL

- Penerapan analisis data spasial dan statistik dalam proses perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat meningkatkan capaian kinerja dan efesiensi anggaran perangkat daerah.
- Rencana program dan kegiatan serta target kinerja perangkat daerah dapat disusun berdasarkan data yang lengkap, valid, aktual serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelum;



